



KR-Subchan Mustafa

Suasana di Jalan Margo Utomo Yogyakarta (Tugu ke selatan), sejak dua hari terakhir sangat lengang menyusul ditutupnya jalan tersebut mulai dari Perempatan Tugu. Penutupan itu untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam rangka penerapan PPKM Darurat.

WUJUD KOMITMEN KEMENAG CEGAH SEBARAN COVID Asrama Haji Yogyakarta Tampung Pasien OTG

YOGYA (KR) - Asrama Haji Transit Yogyakarta yang terletak di Jalan Lingkar Utara, Sinduadi Mlati, selama pandemi ini menampung pasien Covid-19 yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Hal ini wujud komitmen Kementerian Agama turut serta menanggulangi pandemi Covid-19.

“Penggunaan Asrama Haji Transit Yogyakarta sebagai tempat penampungan atau karantina sementara pasien Covid-19 adalah wujud komitmen Kementerian Agama membantu pencegahan penyebaran Covid-19,” tandas H Ahmad Fauzi SH, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DIY, Rabu (7/7).

Fauzi menjelaskan, hal itu telah

mendapat persetujuan dari Kemenag RI dan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Terlebih dua tahun ini Indonesia tidak memberangatkan jemaah haji,” tambah Fauzi.

“Alhamdulillah, seluruh pegawai asrama tidak ada yang terpapar, meski di sekitar mereka para penderita Covid-19, karena selalu patuh protokol kesehatan (prokes) 5M,” kata Fauzi yang juga mantan Kepala Kankemenag Kulonprogo ini.

Ditambahkan, hingga Rabu (7/7) kemarin tercatat ada 64 pasien OTG yang dirawat di Asrama Haji Yogyakarta. “Namun ada penambahan masuk 12 pasien dan 10 pasien keluar sehingga hari ini total ada 66

pasien yang dirawat di sana,” ujar-nya.

Dijelaskan, ada dua gedung di Asrama Haji Yogyakarta yang digunakan untuk merawat pasien OTG. “Gedung Muzdalifah dengan 32 kamar (57 bed) dan Gedung Madinah 12 kamar (22 bed),” ungkap Fauzi. Sedang Gedung Mekah yang terdiri 126 kamar, untuk 114 kamar di lantai 2 hingga 5 saat ini sedang dilakukan perawatan dan 12 kamar di lantai 6, ada 4 kamar untuk tenaga kesehatan.

Seperti diketahui, Kemenag RI telah mengizinkan pemanfaatan asrama haji sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Ada 25 asrama haji di seluruh Indonesia yang telah disiapkan dengan kapasitas mencapai 3.308 orang. **(Fie)-f**

ICMI DIY SERUKAN PROKES 7M

Optimalisasi Shelter, Manfaatkan JEC untuk Pasien

YOGYA (KR) - Mencermati kondisi selama pandemi dan dalam masa pelaksanaan PPKM Darurat, ICMI Orwil DIY memandang perlu adanya optimalisasi shelter mandiri dan berbiaya rendah. Hal itu bisa dilakukan melalui pemanfaatan gedung sekolah, kampus, penginapan, JEC dan bangunan lain yang belum efektif, atau menganggur, guna menampung pasien yang tidak terfasilitasi di rumah sakit, puskesmas maupun poliklinik.

Sikap tersebut disampaikan Ketua ICMI Orwil DIY Herry Zudianto kepada media di Golo, Rabu (7/7). Pernyataan sikap merupakan keprihatinan ICMI DIY karena angka kasus yang terus meningkat, rumah sakit bahkan juga shelter yang penuh. Sementara cukup banyak masyarakat yang masih memerlukan. Apalagi mengingat sudah adanya pemikiran pendirian tenda untuk pasien mengingat kondisi RS di DIY yang kian

kritis. (KR, 7/7)

Disebutkan Herry, peningkatan jumlah warga masyarakat terpapar virus Corona membuat kewalahan tenaga kesehatan di lapangan. Diperlukan beberapa langkah antisipatif guna mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah perlunya melibatkan SDM di perguruan tinggi berketrampilan medis untuk mendukung tenaga kesehatan yang jumlahnya tidak sepadan dengan jumlah pasien covid yang terus

bertambah. “Untuk itu, perlu kajian untuk refocusing Dana Keistimewaan guna menanggulangi kedaruratan krisis pandemi,” tandas Herry.

Dengan melihat varian baru virus Corona, ICMI DIY memandang perlu diperkuatnya disiplin protocol kesehatan. Yang semula 3M : memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan kemudian sudah ditingkatkan menjadi 5M dengan ditambah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, menurut Herry sudah harus ditingkatkan untuk mendukung terciptanya hidup sehat.

“Untuk memutus matrantai Covid-19, harus digelorakan 7M. Karena mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, masih belum cukup. Tambah dengan menghindari makan bersama dan menghindari foto bersama tanpa masker. Ini

harus dilakukan untuk mengisolir virus agar tidak sempat bermutasi,” tandasnya.

Herry mengatakan, dalam jangka pendek, krisis oksigen memerlukan tindakan cepat dan tepat guna menghindari bertambahnya jumlah korban yang tidak diinginkan. Untuk itu, perlu alihkan segera jatah industri ke kesehatan dan ada percepatan distribusi dari pabrik-pabrik oksigen. Selain itu, optimalisasi pelibatan Ketua RT/RW sebagai penyambung lidah pemerintah dan memberikan literasi Covid-19 yang lebih baik di tingkat kampung / pemukiman.

Mantan Walikota Yogya ini juga mengingatkan perlunya ajakan agar masyarakat meningkatkan partisipasi dalam penanganan pandemi, lewat berbagai aksi dan kepedulian sosial. Seperti distribusi sembako, pembagian oksimeter, penyediaan shelter mandiri, vaksinasi massal (se-

hingga tercapai angka 1-2 juta perhari) dan sejenisnya. Hal ini memerlukan dukungan kebijakan dan fasilitasi yang kondusif untuk segera mencapai *herd immunity*.

“Kita perlu meningkatkan kapasitas 3T (*test, tracing* dan *treatment*). Test PCR dari yang semula 100.000 test/hari menjadi 500.000 test/ hari,” tambahnya. Sehingga diharapkan jangkauan untuk mendapatkan pasien terkonfirmasi dan selanjutnya dapat menentukan tindakan berikutnya, bagi OTG (orang tanpa gejala), apakah diperlukan perawatan, karantina, atau isolasi mandiri. Dalam hal ini menurut Herry, perlunya petunjuk teknis (juknis) yang lebih detil yang mengiringi setiap instruksi, edaran dan keputusan. Sehingga memudahkan pelaksanaan, kontrol, implementasi dan evaluasi di tingkat masyarakat ter- bawah. **(Fsy)-f**

PENYALURAN BST DIRENCANAKAN JULI

PPKM Darurat, PKL Berharap Dapat Stimulus

YOGYA (KR) - PKL di DIY semakin terpuruk dan mengalami penurunan omset yang luar biasa dan banyak yang tutup daripada mengeluarkan biaya operasional lebih besar. Tekanan tersebut telah dirasakan sejak awal pandemi Covid-19 yang kini dihantam dengan adanya kebijakan pengetatan yang dikeluarkan pemerintah, yang terbaru PPKM Darurat Jawa Bali ini.

“Nasib PKL di DIY sudah berada diujung tanduk, sehingga sangat membutuhkan bantuan bertahan hidup dan stimulus terutama permodalan agar bangkit kembali berjualan. Jika pemerintah sudah mengeluarkan bansos dengan berbagai skema, itu lebih menyasar kepada kelompok keluarga miskin, bukan PKL yang notabene merupakan pelaku usaha mikro kecil,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Mukhlis Madani kepada KR di Yogyakarta, Rabu (7/7).

Mukhlis mengakui, pihaknya sebenarnya memahami kondisi pandemi sehingga pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Namun pemerintah tetap harus memikirkan dampak dari PPKM Darurat ini baik berupa insentif atau bantuan kepada PKL. Sebab omzet PKL di DIY turun drastis di kisaran 70 hingga 80 persen saat ini, bahkan mayoritas PKL memilih tidak berjualan daripada merugi.

“Kondisi PKL jelas pendapatannya

berkurang, bahkan tidak ada pendapat- an juga ada sehingga mereka tetap membutuhkan bantuan setidaknya untuk bertahan hidup. Bantuan tersebut bisa dalam wujud sembako atau uang tunai, namun bagi PKL sampai sekarang belum ada sama sekali. Padahal, kami sudah diminta mendata anggota yang membutuhkan bantuan oleh Pemkab setempat namun belum dikasih sampai sekarang,” ungkapnya.

Pihaknya sangat berharap keberpihakan pemerintah terhadap PKL, khususnya memberikan bantuan dan stimulus. Setidaknya bantuan tersebut bisa sedikit meringankan beban hidup khususnya bagi PKL di DIY. Selain itu, APKLI DIY berharap agar kebijakan PPKM Darurat tidak diperpanjang kedepannya agar tidak semakin mematikan bisnis PKL di DIY.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih menambahkan, sebagai bentuk konsekuensi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Dinas Sosial DIY akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat yang berhak. Rencananya bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut akan disalurkan pada Juli 2021. Bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan diberikan tiap Kepala Keluarga (KK) sebagai kelanjutan program serupa yang sudah selesai untuk periode Januari-April 2021 lalu. Jadi, nantinya masyarakat yang berhak

akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu di bulan Juli .

“Saat ini Kemensos baru melakukan proses revisi anggaran untuk perpanjangan BST bagi warga terdampak. Meski begitu dipastikan bulan Juli BST bisa dibagikan kepada warga. Jadi kalau ditanya soal berapa kuota penerima BST pada Juli 2021 kami belum bisa berkomentar banyak. Tapi kalau dilihat dari data sebelumnya jumlahnya ada 121.788 KK yang menerima bantuan pada Januari sampai April,” kata Endang.

Endang mengungkapkan, supaya pendistribusiannya tepat sasaran atau tidak doble. Penerima BST lanjutan harus memenuhi sejumlah kriteria. Diantaranya tidak menerima bantuan program lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan sembako. Selain itu masyarakat penerima BST sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi.

“PPKM Darurat yang diberlakukan mulai 3 Juli sampai 20 Juli pasti menimbulkan dampak kepada masyarakat. Untuk itu saat ini pihaknya tengah melakukan penyesiran dan revisi anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Adapun untuk jumlah besarnya belum bisa dipastikan karena baru penyesiran anggaran,” tandasnya.

(Ira/Ria)-f

PENGUNJUNG DIIMBAU MENAHAN DIRI

Taman Wisata Tamansari Tutup Selama PPKM Darurat

YOGYA (KR) - Sejumlah destinasi wisata ditutup selama penerapan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Tak terkecuali Taman Wisata Tamansari. Pengunjung atau wisatawan pun diimbau menahan diri untuk tidak nekat berkunjung.

Ketua Kampung Wisata Tamansari Ibnu Titianto, sudah ada keputusan dari pihak Kraton maupun hasil koordinasi dari semua stakeholder dan pelaku wisata di Tamansari untuk menutup kegiatan pariwisata maupun kegiatan umum lainnya. “Sudah ada instruksi dari Gubernur maupun Walikota Yogya terkait PPKM Darurat. Ketika ada aturan yang mengikuti selain itu, kita juga akan melaksanakan,” jelasnya, Rabu (7/7).

Oleh karena itu, semua kegiatan pariwisata di Tamansari diberhentikan total untuk sementara. Pihaknya telah mengkon- disikan agar seluruh pelaku wisata di sana untuk menutup akses bagi pengunjung.

Meskipun PPKM Darurat telah diberlakukan, imbuhan Ibnu, masih ada beberapa wisatawan yang nekat datang ke Tamansari. Dari pengamatannya, ada beberapa wisatawan dari luar Kota Yogya yang menggunakan kendaraan pribadi

berupa mobil dan sepeda masih nekat datang ke Tamansari. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya menempuh cara dengan menutup akses jalan masuk ke lokasi wisata Tamansari.

“Pengamatan kami di lapangan ternyata masih banyak warga dari luar Kota Yogya. Entah mungkin sengaja atau ketidaktahuan tentang PPKM Darurat, tetap nekat untuk berkunjung ke Tamansari. Kita sepakat untuk mensukseskan PPKM Darurat dengan menutup akses beberapa jalan menuju kampung Tamansari,” urai Ketua Rukun Warga 08 Patehan tersebut.

Selama penutupan akses wisatawan, kawasan di kampung wisata itu tetap berbe- nah guna menjamin rasa aman dan nyaman bagi warga maupun wisatawan kelak. Terutama dengan bergotong royong melakukan penyemprotan disinfektan di area kampung wisata Tamansari. Warga yang selama ini terlibat sebagai pemandu wisata juga membantuk mengamankan area wisata. Harapannya ketika kelak dibuka kembali untuk wisatawan, maka pengunjung tidak perlu merasa was-was sepanjang disiplin menerapkan protokol kese- hatan. **(Dhi)-f**

PEMERIKSAAN SEBATAS VISUAL

Penjualan Hewan Kurban Tetap Diawasi

YOGYA (KR) - Penjualan pasar tiban hewan kurban di Kota Yogya tetap di-awasi meski diterapkan PPKM Darurat. Hanya proses pengawasan lebih cepat dari biasanya karena lebih mengedepankan aspek visual.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Suyana, menyebut kegiatan rutin menjelang Idul Adha yaitu peman- tauan penjualan hewan kurban tetap di- lakukan meski dengan protokol peman- tauan yang lebih cepat. “Kami tetap melakukan pemantauan. Sudah dimulai sejak 30 Juni di beberapa lokasi yang menjual hewan kurban,” katanya, Rabu (7/7).

Meskipun demikian protokol pemerik- saan kesehatan hewan kurban di- lakukan lebih cepat sebagai upaya me- ngurangi kontak antara petugas dengan penjual hewan kurban. Hal ini untuk mengantisipasi potensi penularan Covid- 19. Di samping itu petugas pun tidak memberikan kalung untuk hewan kur- ban yang dinyatakan sehat dan memenuhi ketentuan syariat sebagai hewan kurban sebagaimana yang rutin dilakukan pada tahun-tahun sebelum- nya.

Suyana mengaku, pihaknya sebe- narnya sudah menyiapkan kalung seba- gai penanda hewan yang sehat dan layak. Tetapi, karena tahun ini pemerik- saan dilakukan cepat secara visual maka

kalung tidak diberikan.

Hingga saat ini sudah ada 15 sapi, 36 kambing dan 620 domba yang sudah diperiksa. Rata-rata mengalami sakit pa- da mata yaitu mata kemerahan namun langsung diberikan obat di lapangan. “Petugas juga memberikan penanda pa- da hewan yang tidak sehat atau tidak layak menjadi hewan kurban, misalnya kambing yang mengalami katarak,” im- buhnya.

Penjual pun diminta segera meng- hubungi petugas atau klinik apabila ada hewan yang mendadak sakit. Hal ini agar kondisi hewan kurban yang dijual dipastikan sehat dan aman dikonsumsi. Apalagi petugas juga akan kembali ke lokasi penjualan hewan apabila ada tam- bahan hewan kurban yang baru datang.

Suyana menambahkan, kegiatan pe- meriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan hingga 23 Juli. Pihaknya memprediksi, jumlah hewan kurban pa- da tahun ini akan mengalami penurunan jika dilihat dari tren pada 2020 yang juga turun dibanding 2019. “Penjualan hewan kurban pun tidak seramai tahun lalu,”katanya.

Sedangkan untuk kondisi tempat berjualan hewan kurban, dirinya menye- but sudah cukup baik. Penjual sudah memperhatikan kesejahteraan hewan kurban dengan menyediakan kandang dengan luas yang cukup. **(Dhi)-f**